

A network pattern of white dots connected by thin white lines on an orange background, located in the top right corner of the cover.

LKIP 2025

A thick, dark grey diagonal stripe with a white border, running from the top left towards the center.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Three parallel diagonal stripes in shades of orange and light blue, running from the bottom left towards the center.

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**



EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 ini menekankan pada analisis di tataran atau dimensi *outcome* dan *output*. Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat tersusun.

LKIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BKAD Kota Bandar Lampung. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Semoga LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 05 Januari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung,

ZAKKY IRAWAN, S.E., M.M
NIP. 19801219 200501 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Grafik | iii |
| Daftar Tabel | iv-v |
| Ringkasan (<i>Executive summary</i>) | vi |
| Bab I Pendahuluan | I.1 |
| 1.1 Latar Belakang | I.1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi, dan Sumber Daya Manusia | I.3 |
| 1.3 Sarana dan Prasarana | I.8 |
| 1.4 Isu Strategis..... | I.11 |
| 1.5 Sistematika Laporan..... | I.12 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | II.1 |
| 2.1 Perencanaan Kinerja | II.1 |
| 2.2 Rencana Strategis BKAD Tahun 2025-2029..... | II.2 |
| 2.3 Rencana Kinerja Tahunan | II.6 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja | II.9 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | III.1 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | III.1 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025..... | III.19 |
| Bab IV Penutup | IV.1 |

LAMPIRAN

- RKT 2025
- Tabel E.81 Evaluasi renja 2025



DAFTAR GRAFIK

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Grafik I.1. SDM BPKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian..... | I.6 |
| 2 | Grafik I.2. PNS BPKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan ... | I.7 |
| 3 | Grafik III.1 tingkatan serapan/ realisasi anggaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan indikator sasaran terhadap masing-masing program pada kegiatan tahun 2025..... | III.27 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|----|---|--------|
| 1 | Tabel I.1. Jumlah pegawai BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | I.5 |
| 2 | Tabel I.2. SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian | I.6 |
| 3 | Tabel I.3. PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan | I.7 |
| 4 | Tabel I.4. SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin | I.7 |
| 5 | Tabel I.5. Rincian Kendaraan Dinas /Operasional BKAD Kota Bandar Lampung | I.8 |
| 6 | Tabel I.6. Peralatan Kantor BKAD Kota Bandar Lampung | I.9 |
| 7 | Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKAD Kota Bandar Lampung..... | II.6 |
| 8 | Tabel II.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kota Bandar Lampung.. | II.8 |
| 9 | Tabel III.1. Skor Pencapaian Kinerja dan Interpretasi Data (pemahaman data secara kualitatif) Hasil Pengukuran Kinerja | III.2 |
| 10 | Tabel III.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... | III.3 |
| 11 | Tabel III.3. Penyampaian LKPD Tahun 2025..... | III.5 |
| 12 | Tabel III.4. Penyampaian LKPD Tahun 2024..... | III.7 |
| 13 | Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja /Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 dengan Target Dalam Renstra BKAD 2025-2029..... | III.17 |
| 14 | Tabel.6 Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025... | III.10 |
| 15 | Tabel.7 Realisasi Kinerja Keuangan BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Setiap Program..... | III.17 |



BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LKIP Tahun 2025. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia



Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Walikota Kota Bandar Lampung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban BKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan /sasaran strategis instansi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung menyajikan Capaian Kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025



sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung termasuk di dalamnya laporan kinerja aspek keuangan.

1. 2 TUGAS, FUNGSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

BKAD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan dan aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkungannya;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung terdiri dari :

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan, investasi, pinjaman daerah dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan Program dan Informasi, urusan Umum dan Kepegawaian serta urusan keuangan dan Aset, Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. **Bidang Anggaran**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang anggaran meliputi kebijakan perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan pengendalian anggaran. Bidang Anggaran dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
4. **Bidang Akuntansi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akuntansi meliputi monitoring dan evaluasi laporan keuangan OPD, akuntansi dan pelaporan serta implementasi konsepsi kebijakan akuntansi pemerintahan. Bidang Akuntansi dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Implementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
5. **Bidang Perbendaharaan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perbendaharaan meliputi pengeluaran kas dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan administrasi gaji serta kebijakan belanja. Bidang Perbendaharaan dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Belanja;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.



6. **Bidang Aset Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang aset meliputi penatausahaan aset daerah, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah serta pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. Bidang Aset Daerah dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah;
 - c. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
7. **Unit Pelaksana Teknis**;
8. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Bagan Struktur Organisasi BKAD Kota Bandar Lampung terlampir.

1. 2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKAD Kota Bandar Lampung didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2025 berjumlah 103 orang, 1 orang PPPK penuh waktu, 80 orang PPPK paruh waktu, dan 7 orang pramubakti.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tabel I.1. Jumlah Pegawai BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------|------------------|-----------|------------|
| 1. | Pasca Sarjana/S2 | 59 orang | 55.14 % |
| 2. | Sarjana/S1 | 37 orang | 36,40 % |
| 3. | Diploma/D3 | 3 orang | 2,80 % |
| 4. | SMA | 5 orang | 5,66 % |
| JUMLAH | | 104 orang | 100,00% |

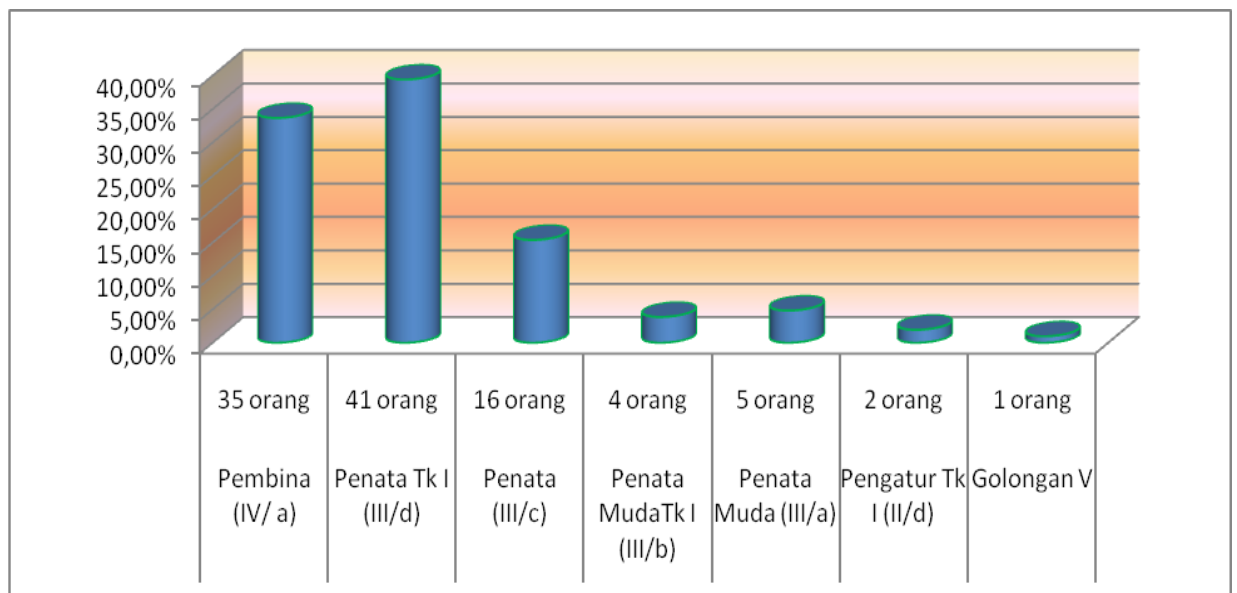


- b. Tabel I.2. SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian.

| No | Pangkat/Golongan | Jumlah | Persentase |
|--------|-------------------------|-----------|------------|
| 1. | Pembina (IV/ a) | 35 orang | 33,65 % |
| 2. | Penata Tk I (III/d) | 41 orang | 39,42 % |
| 4. | Penata (III/c) | 16 orang | 15,38 % |
| 5. | Penata MudaTk I (III/b) | 4 orang | 3,85 % |
| 6. | Penata Muda (III/a) | 5 orang | 4,81 % |
| 7. | Pengatur Tk I (II/d) | 2 orang | 1,92 % |
| 8. | Golongan V | 1 orang | 0,96 % |
| JUMLAH | | 104 orang | 100,00 % |

Dengan Grafik SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian digambarkan sebagaimana Grafik 1. berikut :

Grafik I.1. SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Status Kepegawaian.



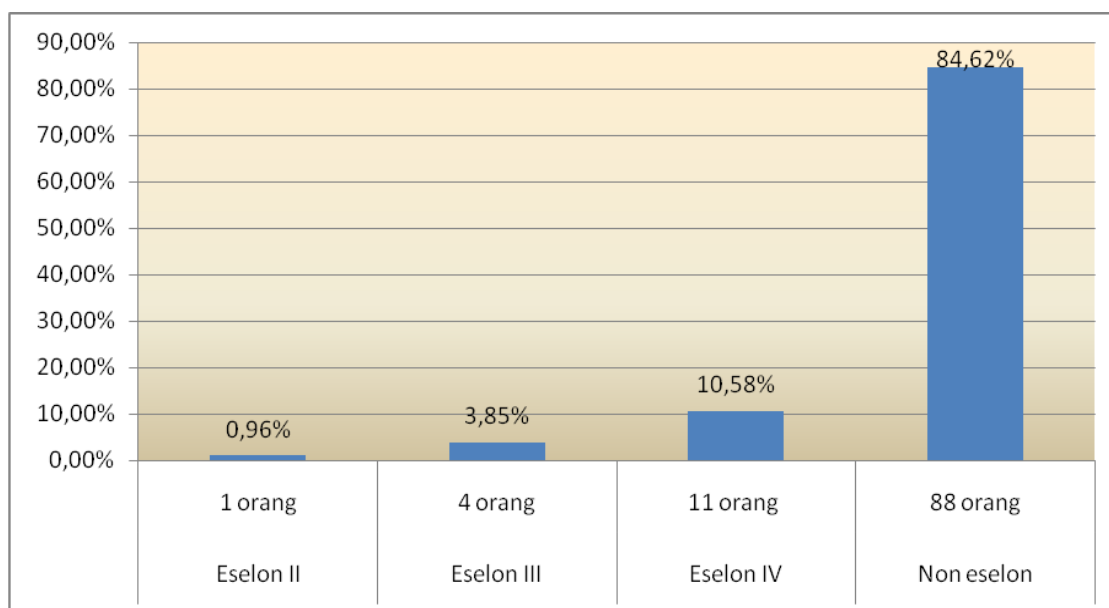


c. Tabel I.3. PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan.

| No. | Jabatan | Jumlah | Persentase |
|--------|------------|-----------|------------|
| 1. | Eselon II | 1 Orang | 0,96% |
| 2. | Eselon III | 4 Orang | 3,85% |
| 3. | Eselon IV | 11 Orang | 10,58% |
| 4. | Non Eselon | 88 Orang | 84,62% |
| Jumlah | | 104 Orang | 100,00% |

Dengan Grafik PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan dapat digambarkan sebagaimana Grafik I.2. berikut :

Grafik I.2. PNS BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jabatan.



d. Tabel I.4. SDM BKAD Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1. | Pria | 35 Orang | 33,65% |
| 2. | Wanita | 69 Orang | 66,35% |
| Jumlah | | 104 Orang | 100,00% |



1.3 SARANA DAN PRASARANA

Perlengkapan yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

a. Sarana

Gedung Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai, yang bertempat di Jalan Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

b. Prasarana

- Pada Tahun 2025 kendaraan dinas/operasional Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung masih belum memadai.

Kendaraan dinas /operasional terdiri dari kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel I.5. Rincian Kendaraan Dinas /Operasional BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025

| No. | Jenis Kendaraan | Jumlah | Keterangan |
|-----|-----------------|---------|-------------------|
| 1. | Mobil | 7Unit | Mobil Jabatan |
| 2. | Motor | 15 Unit | Motor Operasional |

- Sampai dengan Tahun 2025 Perlengkapan Kantor antara lain Meja, Kursi, Filling Kabinet, Lemari Besar dll sudah cukup memadai; dan Peralatan Kantor antara lain Komputer, Printer, Ac, Mesin Photocopy berdasarkan jumlah dan asal perolehannya dapat disimak pada Tabel 6. sebagai berikut:

Tabel I.6. Peralatan Kantor BKAD Kota Bandar Lampung

| No. | Nama Barang | Jumlah | Merk | Keterangan |
|-----|----------------------|---------|------|------------|
| 1. | Air Conditioner (AC) | 13 Unit | - | ADA |



| No. | Nama Barang | Jumlah | Merk | Keterangan |
|-----|---------------------------------|----------|----------------|------------|
| 2. | Printer Inkjet / Laset Jet | 155 Unit | - | ADA |
| 3. | Mesin Photocopy | 2 Unit | - | ADA |
| 4. | Tablet | 12 Unit | Samsung | ADA |
| 5. | Laptop | 73 unit | - | ADA |
| 6. | Komputer | 193 unit | - | ADA |
| 7. | Kamera Digital | 3 buah | Canon | ADA |
| 8. | Vidio Convergence Kamera | 1 buah | Logitech Group | ADA |
| 9. | Hard Disk | 11 buah | Toshiba | ADA |
| 10. | Handy Cam | 2 buah | Sony | ADA |
| 11. | Filling Cabinet | 12 buah | - | ADA |
| 12. | Filling Cabinet 6 laci | 2 buah | - | ADA |
| 13. | Lemari Besi | 27 buah | - | ADA |
| 14. | Lemari Kayu | 4 buah | - | ADA |
| 15. | Lemari Arsip | 3 buah | - | ADA |
| 16. | Lemari Set | 5 buah | - | ADA |
| 17. | Karpet | 1 set | - | ADA |
| 18. | Gorden | 1 set | - | ADA |
| 19. | UPS | 64 buah | - | ADA |
| 20. | Lemari Server | 1 buah | - | ADA |
| 21. | Finger Print dan Kunci Otomatis | 10 buah | - | ADA |
| 22. | Mesin Penghitung Uang | 7 buah | CO AIM | ADA |
| 23. | Mesin absen | 3 buah | - | ADA |
| 24. | Mesin Penghancur Kertas | 29 buah | Dino | ADA |
| 25. | Mesin Tik | 8 buah | - | ADA |
| 26. | Meja Pejabat Indachi | 2 Unit | Indachi | ADA |



| No. | Nama Barang | Jumlah | Merk | Keterangan |
|-----|---------------------|----------|------|------------|
| 27. | Meja Kerja | 204 buah | - | ADA |
| 28. | Meja Kerja 1 biro | 21 buah | - | ADA |
| 29. | Meja Kerja 1/2 biro | 26 buah | - | ADA |
| 30. | Meja Komputer | 14 buah | - | ADA |
| 31. | Meja Rapat | 2 set | - | ADA |
| 32. | Wirelles | 11 buah | - | ADA |
| 33. | DVD | 2 buah | - | ADA |
| 34. | Kulkas | 4 buah | - | ADA |
| 35. | TV | 15 buah | - | ADA |
| 36. | Sofa jati ukir | 2 set | - | ADA |
| 37. | Sofa jok | 3 set | - | ADA |
| 38. | Kursi Direktur | 7 Unit | - | ADA |
| 39. | Kursi staff | 120 Unit | - | ADA |
| 40. | Kursi putar besar | 26 buah | - | ADA |
| 41. | Kursi putar kecil | 94 buah | - | ADA |
| 42. | Kursi stainless | 181 buah | - | ADA |
| 43. | Kursi Tunggu | 2 buah | - | ADA |
| 44. | Tabung Pemadam | 8 buah | - | ADA |
| 45. | Faximil | 2 buah | - | ADA |
| 46. | Telepon/airphone | 3 buah | - | ADA |
| 47. | Exhause fan | 28 buah | - | ADA |
| 48. | Brankas | 5 buah | - | ADA |
| 49. | Kipas Angin | 1 buah | - | ADA |
| 50. | Acces point | 4 unit | - | ADA |
| 51. | LCD Projektor | 4 unit | - | ADA |
| 52. | Rak Buku | 1 buah | - | ADA |
| 53. | Jaringan Komputer | 8 unit | - | ADA |
| 54. | Software | 6 unit | - | ADA |
| 55. | Server | 4 unit | - | ADA |



| No. | Nama Barang | Jumlah | Merk | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|---------|------|------------|
| 56. | Finger Print dan kunci pintu otomatis | 9 buah | - | ADA |
| 57. | CCTV | 1 buah | - | ADA |
| 58. | Mic Wireless | 8 buah | - | ADA |
| 59. | HDD Eksternal | 14 buah | - | SIPKD |
| 60. | Scanner | 3 buah | - | SIPKD |
| 61. | Processor server + heat link | 1 unit | - | SIPKD |
| 62. | Rak Server | 1 unit | - | SIPKD |
| 63. | Hub Switch | 2 unit | - | SIPKD |
| 64. | RAM server | 2 buah | - | SIPKD |
| 65. | Mesin Antrian | 1 buah | - | ADA |
| 66. | Alat penyimpanan perlengkapan kantor | 3 Unit | - | ADA |
| 67. | Plang Nama Pemkot | 80 Unit | - | ADA |
| 68. | Bracket | 1 Unit | - | ADA |
| 69. | Bracket Standang | 1 Unit | - | ADA |
| 70. | Rak Arsip | 5 Unit | - | ADA |
| 71. | Speaker Aktif | 1 Unit | - | ADA |
| 72. | Lemari Partisi | 2 Unit | - | ADA |

Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor BKAD Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai, namun seiring dengan semakin tingginya volume pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandar Lampung, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan penambahan perlengkapan dan peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.



1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandar Lampung dapat sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan melalui Sistem Informasi yang berbasis teknologi dan informasi yang canggih;
- b. Peningkatan Disiplin dan Profesionalisme Aparat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Pelatihan untuk pegawai pemerintahan dalam penggunaan teknologi;
- d. Integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem manajemen data yang terintegrasi, *platform e-government*, dan alat analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data;
- e. Evaluasi terus-menerus terhadap sistem dan kebijakan berbasis teknologi dan memastikan bahwa inisiatif good government tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan ramah terhadap semua kelompok (*Gender, disability, social inclusion*).

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LKIP Tahun 2025 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025, dan Penetapan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

BAB I – PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi , isu-isu strategis yang dihadapi/di lingkup organisasi serta sistematika penulisan ;

BAB II – PERENCANAAN KINERJA, menguraikan muatan Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah untuk periode Tahun 2025 – 2029, ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja 2025.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025. Dalam bab ini juga diinformasikan analisis capaian kinerja masing-masing indikator sasaran, kegiatan-kegiatan lainnya yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2025 dan realisasi anggaran tahun 2025 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB IV – PENUTUP, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2025-2029 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 - 2029, yakni misi ke-5(lima) dari RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2025 – 2029. Misi, Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Bandar Lampung untuk misi 5 maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.



Sasaran : 1. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di pemerintahan Kota Bandar Lampung

2.2 RENCANA STRATEGIS BKAD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut di atas, BKAD telah menyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029 berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 – 2029.

Secara ringkas substansi Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 – 2029 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

1.1 Tujuan

merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka BKAD Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”



1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundang-undangan

1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen pegawai yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan penatausahaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terpadu;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan aset secara terpadu



Kebijakan mensinergikan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan *leverage* sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut :

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah :

1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah;
2. Profesionalisme pengelolaan aset daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BKAD Kota Bandar Lampung

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator tujuan/sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
|----|--|--|--|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | | Opini BPK atas laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan | Persentase jumlah laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2025 (RKT Tahun 2025 terlampir).

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas OPD selaku penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan



memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025-2029

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | ALASAN | SATUAN | TARGET |
|--|--|---|--|---|--------|--------|
| Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | | Opini BPK atas laporan keuangan | Opini BPK : 1. OTW (Opini Tidak Wajar) 2. Disclaimer (tidak beropini) 3. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 4. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) | Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yang menjadi landasan untuk mencapai opini WTP. | Opini | WTP |
| | Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan,pe nganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah | Persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu | Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir | Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memuat pedoman teknis untuk menyusun laporan keuangan daerah secara sistematis | Persen | 100 |
| | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan | Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu | Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan | PP Nomor 28 Tahun 2020 | Persen | 100 |



2.4 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penetapan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, tabel penetapan kinerja Badan Keuangan Dan Aset



Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | Opini BPK atas laporan keuangan | WTP |
| 2 | Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah | Persentase laporan keuangan tepat waktu | 100% |
| 3 | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan | Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu | 100% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima Pelaporan/pemberi amanah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden



Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing- masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagaimana Tabel III.1 berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Kinerja | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| | Interval Nilai Realisasi | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1. | 91 ≤ | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel III.2



selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025. Pencapaian IKU BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 secara singkat ditunjukkan oleh tabel dibawah ini :

Tabel III.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Predikat |
|--|---|--------|-----------|---------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | | | | | |
| 1 | Opini BPK atas laporan keuangan | WTP | WTP | 100% | Sangat Tinggi |
| Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah | | | | | |
| 2 | Persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu | 100% | 100% | 103,33% | Sangat Tinggi |
| Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 3 | Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |

TUJUAN :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan **“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”** dapat dilihat dari indikator Opini BPK atas laporan keuangan.

Untuk indikator dari Tujuan yaitu “Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah” dengan target pada tahun 2025 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 memperoleh opini WTP. Realisasinya Opini BPK RI Tahun 2025 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 memperoleh penilaian WTP sesuai LHP No



28B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. Realisasi Opini WTP dimaksud dalam pengukuran IKU dihitung mendapatkan point 4 atau 100% dengan formulasi :

$$\frac{4 \text{ (WTP)}}{4 \text{ (WTP)}} \times 100\% = 100\%$$

Diperoleh kesimpulan bahwa untuk indikator Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan **realisasi capaian kinerja sebesar 100%**.

SASARAN KESATU :

“Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah”

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran kesatu **“Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah”** dapat dilihat dari indikator Persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu.

IKU yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan ditunjukkan dengan indikator persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu mencapai 100%. Pencapaian angka 116% tersebut diperoleh karena lamanya waktu penyusunan LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dicapai selama 87 (hari) hari dari target 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.



Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan LKPD, semakin cepat melaksanakan penyusunan LKPD maka capaian kinerja semakin baik.

Tanggal penyampaian LKPD : 27 Maret 2025

Target kinerja : 90 hari

Capaian : 87 hari

$$\begin{aligned} \text{Pengitungan Mundur} &= (((2 \times \text{target}) - \text{realisasi}) \times 100\%) / \text{target} \\ &= (((2 \times 90) - 87) \times 100\%) / 90 \\ &= 103,33\% \end{aligned}$$

Tabel III.3 Penyampaian LKPD Tahun 2025

| No | URAIAN | |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Penyampaian LKPD Tahun 2024 | |

SASARAN KEDUA

“Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan-Perundangan”

Pada Sasaran Ketiga “Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai Peraturan-Perundangan” dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu. Yang mana indikator persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu sampai dengan laporan ini disusun



mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian target kinerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan PP no 28 Tahun 2020 laporan BMD semesteran dan tahunan. Sehingga dalam 1 tahun laporan BMD ada 2 laporan yaitu Laporan BMD semesteran dan laporan BMD tahunan. Pada Tahun 2025 tercapai target 2 laporan BMD semesteran dan tahunan.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} &= \frac{\text{jumlah laporan BMD realisasi}}{\text{Jumlah laporan BMD sesuai ketentuan}} \times 100\% \\ &= \frac{2 \text{ laporan}}{2 \text{ laporan}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

3.1.2 REALISASI KINERJA / CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Guna menyelaraskan dan mempermudah perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2025 capaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)/ Indikator Kinerja BKAD Kota Bandar Lampung, tentunya pada realisasi/ capaian kinerja untuk indikator sasaran yang terdapat kesamaan pada tahun 2024 dan target kinerja menggunakan satuan persen (%) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Untuk Indikator Kinerja Utama Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah dengan target pada tahun 2024 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 memperoleh opini WTP. Realisasinya Opini BPK RI Tahun 2025 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 memperoleh penilaian WTP sesuai LHP No 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024. Realisasi Opini WTP dimaksud dalam pengukuran IKU dihitung mendapatkan point 4 atau 100% dengan formulasi :

$$\underline{4 \text{ (WTP)}} \times 100\% = 100\%$$



4 (WTP)

Diperoleh kesimpulan bahwa untuk indikator Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan **realisasi capaian kinerja sebesar 100%**.

Untuk indikator persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu tepat waktu mencapai 100%. Pencapaian angka 100% tersebut diperoleh karena lamanya waktu penyusunan LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dicapai selama 87 (delapan puluh tujuh) hari dari target 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan LKPD, semakin cepat melaksanakan penyusunan LKPD maka capaian kinerja semakin baik.

Tanggal penyampaian LKPD : 16 Maret 2024

Target kinerja : 90 hari

Capaian : 75 hari

$$\begin{aligned} \text{Pengitungan Mundur} &= (((2 \times \text{target}) - \text{realisasi}) \times 100\%) / \text{target} \\ &= (((2 \times 90) - 75) \times 100\%) / 90 \\ &= 116,67\% \end{aligned}$$

Tabel III.4 Penyampaian LKPD Tahun 2024

| No | URAIAN | |
|----|--------|--|
| o | | |



| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Penyampaian LKPD Tahun 2024 | |
|---|-----------------------------|--|

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA/ CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 dan 2025 DENGAN TARGET DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI (RENSTRA BKAD).

Berdasarkan pada realisasi indikator kinerja sasaran, perbandingan dengan target kinerja yang terdapat dalam Renstra BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja /Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 dengan Target Dalam Renstra BKAD 2025-2029

| No | Tujuan | | Sasaran Strategi | | Indikator Kinerja Utama | | Target Kinerja | | Realisasi/capaian kinerja | |
|----|---|--|---|--|---|---|----------------|------|---------------------------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| 1 | Tersusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel | | | Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah | WTP | WTP | 100% | 100% |
| | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan penatausahaan keuangan daerah | Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku | Persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu | 100% | 100% | 116,67% | 103,33% |
| | | | | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan | - | Persentase laporan BMD Kota Bandar | - | 100% | - | 100% |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | perundang-undangan | | Lampung | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|---------|--|--|--|--|

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 dapat mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang telah ditetapkan.

3.1.4. ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN KINERJA.

Dari hasil analisis terhadap formulir pengukuran pencapaian sasaran yang mana Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama terlihat bahwa dari ketiga indikator kinerja utama mencapai kinerja dalam kategori “sangat tinggi” Dengan demikian capaian kinerja yang dicapai oleh BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 secara keseluruhan tercapai secara maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam pelaksanaan renstra tahun ke-1 (satu).

3.1.5. PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.

Dalam melaksanakan program prioritas yang meliputi kegiatan (BKAD) Kota Bandar Lampung melakukan upaya-upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain:

1. Adanya komitmen Pimpinan dan semua pihak dalam mendukung pencapaian Opini WTP
2. Adanya dukungan yang baik dari DPRD selaku mitra Pemerintah Kota dalam penyusunan dan pelaporan APBD
3. Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung sehingga mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat
4. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Langkah yang ditempuh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada tahun anggaran yang akan datang akan selalu ditingkatkan guna tercapainya tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk selalu



memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. 2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.

Dalam melaksanakan program prioritas yang disusun menurut kegiatan untuk pencapai kinerja berpedoman kepada indikator sasaran BKAD Kota Bandar Lampung yang diinginkan, Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan tingkat kinerja yang telah disepakati bersama. APBD BKAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 sedangkan APBD Perubahan 2025 berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2025.

Pagu /Anggaran dan Realisasi Anggaran TA. 2025 berdasarkan program terhadap indikator sasaran pada kegiatan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam APBD TA. 2025 dan APBD Perubahan TA. 2025, serta Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2024 per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam Tabel III.6 berikut:

Tabel III.6 Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Sasaran | P a g u | Realisasi | % Realisasi Anggaran |
|-----|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan | 128.794.087.416,00 | 55.430.545.739,00 | 43,04 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas | 579.718.974,00 | 517.824.228,00 | 89,32 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 146.482.343,00 | 114.782.280,00 | 78,36 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 58.050.119,00 | 52.049.935,00 | 89,66 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD | 53.532.040,00 | 50.113.535,00 | 93,61 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 31.771.888,00 | 24.833.719,00 | 78,16 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD | 59.869.426,00 | 58.438.530,00 | 97,61 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 121.223.498,00 | 114.341.320,00 | 94,32 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 108.789.660 | 103.264.909,00 | 94,92 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel | 120.444.753.673,00 | 48.284.495258,00 | 40,09 |
| 4 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 119.428.562.877,00 | 47.456.521.912,00 | 39,74 |
| 5 | Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 609.480.786,00 | 512.826.505,00 | 84,14 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 406.710.000,00 | 315.146.841,00 | 77,49 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 188.037.608,00 | 186.040.000,00 | 98,94 |
| 7 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 8 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan yugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 188.037.608,00 | 186.040.000,00 | 98,94 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD | 1.794.273.961,00 | 1.586.677.406,00 | 88,43 |
| 9 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 115.002.552,00 | 100.118.583,00 | 87,06 |
| 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 172.223.086,00 | 145.840.451,00 | 84,68 |
| 11 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 78.305.810,00 | 76.127.375,00 | 97,22 |
| 12 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 78.000.000,00 | 21.413.000,00 | 27,45 |
| 13 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 150.965.532,00 | 135.500.274,00 | 89,76 |
| 14 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 38.560.000,00 | 38.560.000,00 | 100 |
| 15 | Fasilitas kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 89.000.000,00 | 52.800.000,00 | 59,33 |
| 16 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 513.706.236,00 | 480.935.430,00 | 93,62 |
| 17 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 558.510.745,00 | 535.382.320,00 | 95,86 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor | 738.358.000,00 | 228.837.491,00 | 30,99 |
| 18 | Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 86.158.000,00 | 85.118.500,00 | 98,79 |
| 20 | Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 152.200.000,00 | 143.718.991,00 | 94,43 |
| 7 | Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD | 4.476.525.200,00 | 4.191.386.045,00 | 93,63 |
| 21 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 252.010.000,00 | 225.472.645,00 | 89,47 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 22 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan | 4.224.515.200,00 | 3.965.913.400,00 | 93,88 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Inventaris kantor yang tersedia | 572.420.000,00 | 435.285.311,00 | 76,04 |
| 23 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 52.430.000,00 | 36.019.416,00 | 68,70 |
| 24 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 313.790.000,00 | 228.106.056,00 | 72,68 |
| 25 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 78.500.000,00 | 68.156.036,00 | 86,82 |
| 26 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 127.700.000,00 | 103.003.800,00 | 80,66 |
| II | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase laporan keuangan tepat waktu | 137.958.999.514,00 | 73.014.672.415,00 | 52,92 |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | 5,042.943.937,00 | 4.176.779.530,00 | 82,82 |
| 27 | Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun | 773.133.061,00 | 567.477.363,00 | 73,40 |
| 28 | Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun | 451.620.580,00 | 371.329.831,00 | 82,22 |
| 29 | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD | Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD | 695.846.861,00 | 601.165.628,00 | 86,39 |
| 30 | Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | 716.855.426,00 | 630.327.899,00 | 87,93 |
| 31 | Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran | Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran | 785.346.673,00 | 709.021.131,00 | 90,28 |
| 32 | Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan | 820.473.825,00 | 651.055.256,00 | 79,35 |
| 33 | Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | 799.667.511,00 | 646.402.422,00 | 80,83 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|----------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 2 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | 6.614.782.975,00 | 5.452.862.228,00 | 82,43 |
| 34 | Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah | 1.484.557.580,00 | 1.208.287.063,00 | 81,39 |
| 35 | Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | 1.279.351.155,00 | 1.125.650.615,00 | 87,99 |
| 36 | Koordinasi pelaksanaan dan pemantauan non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | 653.428.367,00 | 460.422.742,00 | 70,46 |
| 37 | Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) | Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) | 554.886.732,00 | 497.536.607,00 | 89,66 |
| 38 | Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas | jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas | 400.385.593,00 | 368.405.567,00 | 92,01 |
| 39 | Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | 997.144.188,00 | 884.158.855,00 | 88,67 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 40 | Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | 1.245.029.360,00 | 908.400.779,00 | 72,96 |
| 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | 1.451.882.412,00 | 1.279.563.295,00 | 88,13 |
| 41 | Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran | 369.874.677,00 | 340.496.572,00 | 92,06 |
| 42 | Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah | Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi | 372.766.438,00 | 317.361.223,00 | 85,14 |
| 43 | Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota | 425.096.343,00 | 385.316.896,00 | 90,64 |
| 44 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | Persentase penyelesaian kasus kerugian daerah | 13.847.000,00 | 9.263.000,00 | 66,90 |
| 45 | Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah | 162.512.169,00 | 141.155.560,00 | 86,86 |
| 47 | Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota | 107.785.785,00 | 85.970.044,00 | 79,76 |
| 4 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat | 122.692.434.002,00 | 60.206.493.274,00 | 49,07 |
| 48 | Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah | 49.083.000,00 | 41.696.000,00 | 84,95 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2025



| | | | | | |
|------------|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 49 | Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah | 12.675.516.689,00 | 6.624.197.088,00 | 52,26 |
| 50 | Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 34.307.034.313,00 | 18.105.208.010,00 | 52,77 |
| 51 | Pengelolaan dana darurat dan mendesak | Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak | 75.660.800.000,00 | 35.435.392.176 | 46,83 |
| 5 | Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah | Terlakasananya Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah | 2.156.956.188,00 | 1.898.974.088,00 | 88,04 |
| 52 | Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah | 161.724.370,00 | 143.545.039,00 | 88,76 |
| 53 | Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah | Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah | 286.000.000,00 | 257.300.000,00 | 89,97 |
| 54 | Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota | 1.709.231.818,00 | 1.498.129.049,00 | 87,65 |
| III | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah | 3.589.306.766,00 | 2.715.224.375,00 | 75,65 |
| 1 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase laporan BMD Kota Bandar Lampung yang tepat waktu | 3.589.306.766,00 | 2.715.224.375,00 | 75,65 |
| 55 | Penyusunan standar harga | Jumlah standar harga yang disusun | 216.266.278,00 | 214.444.350,00 | 99,16 |
| 56 | Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | 108.073.076,00 | 70.115.030,00 | 64,88 |
| 57 | Penatausahaan barang milik daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah | 182.503.480,00 | 85.683.774 | 46,95 |
| 58 | Pengamanan barang milik daerah | Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah | 960.659.566,00 | 602.922.554,00 | 62,76 |
| 59 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan gasil koordinasi penilaian barang milik daerah | 120.580.578,00 | 95.904.247,00 | 79,54 |



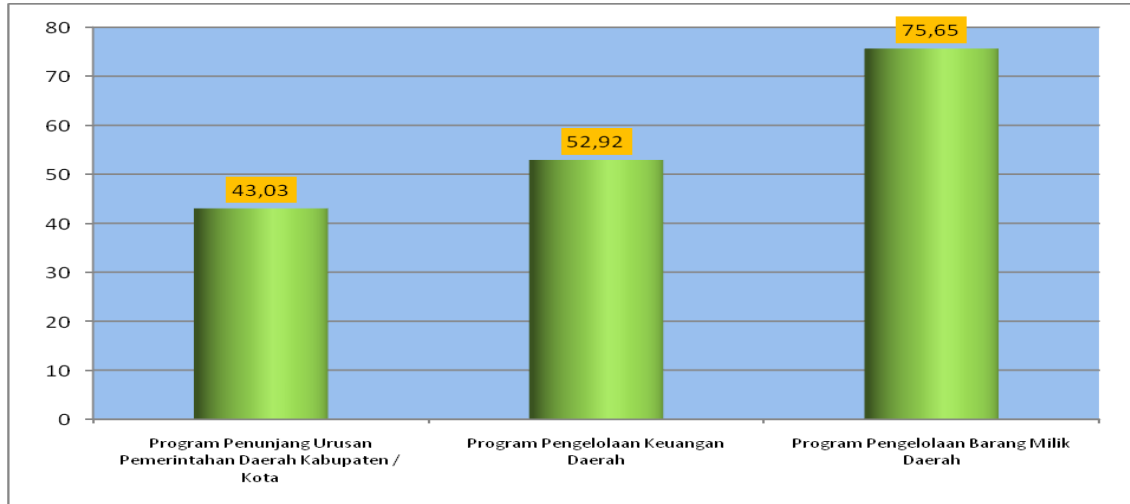
| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 60 | Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah | 507.787.273,00 | 313.110.679,00 | 61,66 |
| 61 | Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah | 765.248.328,00 | 619.990.174,00 | 81,02 |
| 62 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan Barang Milik Daerah | 728.188.187,00 | 713.053.567,00 | 97,92 |
| Total | | | 270.342.393.696,00 | 131.160.442.529,00 | 48,52 |

Pada tabel III.7 dapat dilihat realisasi kinerja keuangan BKAD kota Bandar Lampung Tahun 2025 untuk masing-masing program.

Tabel III.7. Realisasi Kinerja Keuangan BKAD Kota Bandar Lampung
Tahun 2025 Setiap Program

| No. | Program | Indikator Program | Keterangan |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan | 43,04 % |
| 2 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | persentase laporan keuangan tepat waktu | 52,92 % |
| 3 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Laporan BMD Kota Bandar Lampung Yang tepat waktu | 75,65 % |

Grafik.III.1 Tingkatan serapan/realisasi anggaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 berdasarkan indikator sasaran terhadap masing-masing program pada kegiatan tahun 2025.



Berdasarkan data tingkatan serapan/ realisasi anggaran BKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dapat dilihat bahwasanya pencapaian realisasi sebesar 48,52 % dengan penjabaran realisasi program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mencapai realisasi sebesar 43,03%, sub kegiatan yang rendah yaitu sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tamu dengan realisasi anggaran sebesar 27,45% dikarenakan kegiatan tersebut sangat tergantung kepada adanya rapat yang rutin dan rapat mendadak.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai realisasi sebesar 52,92%, hanya pada sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah dengan realisasi sebesar 66,90% dikarenakan tidak adanya kegiatan di majelis TGR (Tuntutan Ganti Rugi), Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dengan realisasi 52,77%, dikarenakan sebagian penerima tidak mengajukan usulan pencairan, dan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan realisasi 46,83%, dikarenakan dana pada sub



kegiatan ini dikhususkan untuk mengantisipasi keadaan yang sifatnya darurat dan mendesak.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai realisasi sebesar 75,65%, hanya pada sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan realisasi sebesar 62,76% dikarenakan dikarenakan honor kegiatan tidak dapat dicairkan karena proses persertifikasinya belum selesai, dan Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan realisasi anggaran 61,66% dikarenakan ada efisiensi dalam pengadaan belanja modal dan adanya situasi yang tergantung oleh seluruh OPD dan KPKNL.

Permasalahan :

1. Dalam data perencanaan yang sudah menjadi dokumen yang disahkan dalam pelaksanaan anggaran mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Rencana anggaran yang tidak detail sehingga menyebabkan kesulitan saat eksekusi.

Tindak Lanjut :

1. Dengan melihat hasil realisasi ini dapat sebagai acuan tahun tahun kedepannya perencanaan lebih matang dan lebih cermat, dan juga agar kegiatan yang belum terealisasi dapat lebih diperbaiki cara kerja untuk tahun tahun kedepan agar dapat terealisasi maksimal baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan.
2. Meningkatkan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Pada Tahun 2025.

Mengacu pada 1 (satu) tujuan yang dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, dan 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama yang mana dari 3 (tiga) indikator kinerja utama mencapai kinerja keseluruhan 100% kategori “sangat tinggi”, yang mana dapat dilihat pada penjabaran berikut :

Untuk Indikator Kinerja utama pertama yaitu Opini BPK atas laporan keuangan, yang mana dalam target yang ditentukan adalah opini WTP dan dapat dicapai opini WTP sehingga mencapai target kinerja sebesar 100%.

Indikator Kinerja utama kedua yaitu Persentase laporan keuangan Kota Bandar Lampung tepat waktu, yang mana dalam target adalah 100% dan mencapai target kinerja sebesar 116,67%.

Indikator Kinerja utama ketiga yaitu Persentase laporan BMD kota Bandar Lampung yang tepat waktu sebesar yang mana dalam target adalah 100% dan mencapai target kinerja sebesar 100%

Sementara pada kinerja keuangan, Pagu anggaran sebesar Rp. 270.342.393.696,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan



Puluh Enam Rupiah) realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp 131.160.442.529,00 (Seratus Tiga Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 48,52 %.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Bandar Lampung, Januari 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung,

Zakky Irawan, S.E., M.M
NIP. 19801219 200501 1 007

| No | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGLATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT) | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | |
|----|--|--------|---------------|---------|----------|------------------|--|--|--|--------|---|--------|---------------------------------|-------|-------------------|-------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|-------|--------|---|--------|--------|
| | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | | | | SUB KEGIATAN | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | I | | II | | III | | IV | | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | | | | | | | | RUPIAH |
| 1 | 2 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Paket | 18.00 | 782,237,331.92 | 3.00 | 115,002,552.00 | 3.00 | 28,480,200.00 | - | - | 56,453,963.00 | 15,184,420.00 | 3.00 | 100,118,583.00 | 3.00 | 100,118,583.00 | 16.67 | 12.80 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 24.00 | 1,224,380,274.76 | 4.00 | 172,223,086.00 | 4.00 | - | - | 55,448,718.00 | - | 90,391,733.00 | 4.00 | 145,840,451.00 | 4.00 | 145,840,451.00 | 16.67 | 11.91 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 36.00 | 532,629,292.33 | 6.00 | 78,305,810.00 | 6.00 | 19,173,400.00 | - | - | 18,937,044.00 | - | 38,016,931.00 | 6.00 | 76,127,375.00 | 6.00 | 76,127,375.00 | 16.67 | 14.29 | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 42.00 | 530,549,199.38 | 7.00 | 78,000,000.00 | 7.00 | 6,125,000.00 | - | - | 11,760,000.00 | - | 3,528,000.00 | 7.00 | 21,413,000.00 | 7.00 | 21,413,000.00 | 16.67 | 4.04 | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 54.00 | 1,283,569,880.68 | 9.00 | 150,965,532.00 | 9.00 | 43,122,500.00 | - | - | 65,482,098.00 | - | 26,895,649.00 | 9.00 | 135,500,247.00 | 9.00 | 135,500,247.00 | 16.67 | 10.56 | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 36.00 | 258,744,763.39 | 6.00 | 38,040,000.00 | 6.00 | 9,510,000.00 | - | 3,170,000.00 | - | 16,162,000.00 | - | 9,718,000.00 | 6.00 | 38,560,000.00 | 6.00 | 38,560,000.00 | 16.67 | 14.90 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | Laporan | 60.00 | 605,370,240.31 | 10.00 | 89,000,000.00 | 10.00 | - | - | 19,200,000.00 | - | 33,600,000.00 | 10.00 | 52,800,000.00 | 10.00 | 52,800,000.00 | 16.67 | 8.72 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | laporan | 60.00 | 1,770,559,644.01 | 10.00 | 263,679,196.00 | 10.00 | 151,557,035.00 | - | 25,109,309.00 | - | 101,615,717.00 | - | 202,653,369.00 | 10.00 | 480,935,430.00 | 10.00 | 480,935,430.00 | 16.67 | 27.16 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah DokumenDukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | Dokumen | 48.00 | 3,841,929,481.31 | 8.00 | 524,130,745.00 | 8.00 | 61,187,300.00 | - | 8,250,000.00 | - | 162,569,600.00 | - | 303,375,420.00 | 8.00 | 535,382,320.00 | 8.00 | 535,382,320.00 | 16.67 | 13.94 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor | Persen | 98.00 | 5,410,241,451.06 | 100.00 | 738,358,000.00 | - | - | - | 9.52 | 70,318,500.00 | 21.47 | 158,518,991.00 | 30.99 | 228,837,491.00 | 4.23 | 228,837,491.00 | 4.32 | 4.23 | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 2.00 | 3,400,956,406.25 | 1.00 | 500,000,000.00 | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | 50.00 | - | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | Unit | 48.00 | 680,191,281.25 | 8.00 | 63,458,000.00 | - | - | - | 70,318,500.00 | 8.00 | 14,800,000.00 | 8.00 | 85,118,500.00 | 8.00 | 85,118,500.00 | 16.67 | 12.51 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Unit | 30.00 | 1,329,093,763.56 | 5.00 | 174,900,000.00 | - | - | - | 5.00 | 143,718,991.00 | 5.00 | 143,718,991.00 | 5.00 | 143,718,991.00 | 16.67 | 10.81 | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD | Persen | 98.00 | 28,925,120,631.33 | 100.00 | 4,476,525,200.00 | 16.18 | 724,378,727.00 | 10.05 | 450,054,000.00 | 35.90 | 1,607,175,552.00 | 31.49 | 1,409,777,766.00 | 93.63 | 4,191,386,045.00 | 14.49 | 4,191,386,045.00 | 14.79 | 14.49 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Laporan | 6.00 | 1,714,150,047.88 | 1.00 | 252,010,000.00 | 1.00 | 80,904,727.00 | - | 15,071,200.00 | - | 83,131,752.00 | - | 46,364,966.00 | 1.00 | 225,472,645.00 | 1.00 | 225,472,645.00 | 16.67 | 13.15 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 6.00 | 27,210,970,583.45 | 1.00 | 4,224,515,200.00 | 1.00 | 643,474,000.00 | - | 434,982,800.00 | - | 1,524,043,800.00 | - | 1,363,412,800.00 | 1.00 | 3,965,913,400.00 | 1.00 | 3,965,913,400.00 | 16.67 | 14.57 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inventaris Kantor yang Terpelihara | Persen | 98.00 | 3,893,550,932.13 | 100.00 | 572,420,000.00 | 8.58 | 49,118,064.00 | 3.23 | 18,471,172.00 | 15.14 | 86,685,519.00 | 32.63 | 186,796,756.00 | 59.58 | 435,285,311.00 | 11.18 | 435,285,311.00 | 11.41 | 11.18 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan pperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan | Unit | 6.00 | 356,624,288.76 | 1.00 | 52,430,000.00 | 1.00 | 5,530,000.00 | - | 2,726,500.00 | - | 16,236,419.00 | - | 11,526,500.00 | 1.00 | 36,019,419.00 | 1.00 | 36,019,419.00 | 16.67 | 10.10 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan | Unit | 108.00 | 2,134,372,221.43 | 18.00 | 313,790,000.00 | 4.00 | 34,798,064.00 | 4.00 | 15,744,672.00 | 5.00 | 70,449,100.00 | 5.00 | 107,114,220.00 | 18.00 | 228,106,056.00 | 18.00 | 228,106,056.00 | 16.67 | 10.69 | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Paket | 60.00 | 533,950,155.78 | 10.00 | 78,500,000.00 | - | - | - | - | 10.00 | 68,156,036.00 | 10.00 | 68,156,036.00 | 10.00 | 68,156,036.00 | 16.67 | 12.76 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Paket | 6.00 | 868,604,266.16 | 1.00 | 127,700,000.00 | - | 8,790,000.00 | - | - | 10.00 | 94,213,800.00 | 10.00 | 103,003,800.00 | 10.00 | 103,003,800.00 | 16.67 | 11.86 | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | persentase laporan keuangan tepat waktu | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100.00 | | 1.00 | | | | | | |
| | | 5 | 02 | 02 | | | | persentase laporan keuangan tepat waktu | Predikat | WTP | 760,822,229,331.39 | WTP | 137,849,672,014.00 | 20.06 | 27,648,247,800.00 | 3.45 | 4,753,069,040.00 | 14.77 | 20,364,870,989.00 | 14.69 | 20,248,484,586.00 | 52.97 | 73,014,672,415.00 | 9.60 | 73,014,672,415.00 | 9.60 | 9.60 | | | |

| No | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEG LATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT) | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | | |
|----|---------|--------|---------------|---------|----------|------------------|--|---|--|--------|---|--------|---------------------------------|-------|----------------|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|--------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|-------|
| | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | | | | SUB KEGIATAN | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | | RUPIAH | K | RUPIAH | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | | 100.00 | 32,940,944,509.87 | | | 15.78 | 795,914,911.00 | 1.98 | 100,100,000.00 | 33.17 | 1,672,977,661.00 | 31.88 | 1,607,786,958.00 | 82.82 | 4,176,779,530.00 | 12.68 | 4,176,779,530.00 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah | Persen | | | 12.00 | 5,800,812,828.32 | | | 2.00 | 773,133,061.00 | 1.00 | 144,650,000.00 | - | 12,250,000.00 | 1.00 | 171,693,485.00 | - | 238,883,878.00 | 2.00 | 567,477,363.00 | 2.00 | 567,477,363.00 | 16.67 | 9.78 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun | Dokumen | | | 12.00 | 3,185,632,469.53 | | | 2.00 | 451,620,580.00 | - | 64,636,000.00 | - | 24,330,000.00 | 2.00 | 288,225,831.00 | - | 5,862,000.00 | 2.00 | 371,329,831.00 | 2.00 | 371,329,831.00 | 16.67 | 11.66 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah peraturan daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | | | 12.00 | 4,591,228,985.76 | | | 2.00 | 695,846,861.00 | - | 3,220,000.00 | - | 3,220,000.00 | 2.00 | 210,398,111.00 | - | 384,327,517.00 | 2.00 | 601,165,628.00 | 2.00 | 601,165,628.00 | 16.67 | 13.09 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah peraturan daerah Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | | | 12.00 | 4,734,127,413.20 | | | 2.00 | 716,855,426.00 | - | 184,437,411.00 | - | - | 1.00 | 404,234,637.00 | - | 41,655,851.00 | 1.00 | 630,327,899.00 | 1.00 | 630,327,899.00 | 8.33 | 13.31 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | | | 12.00 | 4,278,949,427.48 | | | 2.00 | 785,346,673.00 | - | 67,306,000.00 | - | - | 1.00 | 39,194,175.00 | 1.00 | 602,520,956.00 | 2.00 | 709,021,131.00 | 2.00 | 709,021,131.00 | 16.67 | 16.57 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Dokumen | | | 18.00 | 4,851,626,369.09 | | | 3.00 | 820,473,825.00 | 1.00 | 203,415,500.00 | 1.00 | 60,300,000.00 | 1.00 | 271,300,000.00 | - | 116,039,756.00 | 3.00 | 651,055,256.00 | 3.00 | 651,055,256.00 | 16.67 | 13.42 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | | | 18.00 | 5,498,567,016.50 | | | 3.00 | 799,667,511.00 | 1.00 | 128,250,000.00 | - | - | 1.00 | 287,931,422.00 | 1.00 | 230,221,000.00 | 3.00 | 646,402,422.00 | 3.00 | 646,402,422.00 | 16.67 | 11.76 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah | Persen | 100.00 | 44,059,575,445.45 | | | 14.44 | 936,661,596.00 | 2.79 | 180,634,000.00 | 35.21 | 2,283,134,406.00 | 31.65 | 2,052,432,226.00 | 84.09 | 5,452,862,228.00 | 12.38 | 5,452,862,228.00 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | | | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | | | 72.00 | 7,482,104,093.75 | | | 12.00 | 1,484,557,580.00 | 3.00 | 189,130,000.00 | 3.00 | 65,750,000.00 | 3.00 | 372,074,346.00 | 3.00 | 581,332,717.00 | 12.00 | 1,208,287,063.00 | 12.00 | 1,208,287,063.00 | 16.67 | 16.15 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | | | 18.00 | 9,040,933,367.21 | | | 3.00 | 1,264,351,155.00 | 1.00 | 228,766,900.00 | - | 35,411,000.00 | 1.00 | 453,025,571.00 | 1.00 | 408,447,144.00 | 3.00 | 1,125,650,615.00 | 3.00 | 1,125,650,615.00 | 16.67 | 12.45 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai | Dokumen | | | 72.00 | 4,897,377,225.00 | | | 12.00 | 668,428,367.00 | 3.00 | 130,327,600.00 | 3.00 | 17,520,000.00 | 3.00 | 174,969,600.00 | 3.00 | 137,605,542.00 | 12.00 | 460,422,742.00 | 12.00 | 460,422,742.00 | 16.67 | 9.40 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | | | 30.00 | 3,958,351,340.70 | | | 5.00 | 554,886,732.00 | 2.00 | 106,707,600.00 | 1.00 | 30,542,000.00 | 1.00 | 171,531,496.00 | 1.00 | 188,755,511.00 | 5.00 | 497,536,607.00 | 5.00 | 497,536,607.00 | 16.67 | 12.57 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah | Dokumen | | | 6.00 | 2,664,236,420.58 | | | 1.00 | 370,385,593.00 | - | 33,678,000.00 | - | 1,610,000.00 | 1.00 | 176,415,632.00 | - | 156,701,935.00 | 1.00 | 368,405,567.00 | 1.00 | 368,405,567.00 | 16.67 | 13.83 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Dokumen | | | 384.00 | 6,839,160,155.08 | | | 54.00 | 997,144,188.00 | 13.00 | 196,933,000.00 | 13.00 | 19,160,000.00 | 13.00 | 415,708,855.00 | 15.00 | 252,357,000.00 | 54.00 | 884,158,855.00 | 54.00 | 884,158,855.00 | 14.06 | 12.93 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Dokumen | | | 90.00 | 9,177,412,843.14 | | | 15.00 | 1,145,029,360.00 | 3.00 | 51,118,496.00 | 3.00 | 10,641,000.00 | 4.00 | 519,408,906.00 | 5.00 | 327,232,377.00 | 15.00 | 908,400,779.00 | 15.00 | 908,400,779.00 | 16.67 | 9.90 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Opini BPK atas LKPD | Predikat | WTP | 10,652,164,141.65 | | | 18.77 | 276,423,400.00 | 3.92 | 57,691,000.00 | 34.43 | 507,067,149.00 | 29.77 | 438,381,746.00 | 86.89 | 1,279,563,295.00 | 12.01 | 1,279,563,295.00 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | | |

| No | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGLATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT) | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025 S/D TW I) | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|--|--------|---------------|---------|----------|------------------|--|---------------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | | | | SUB KEGIATAN | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | | RUPIAH | K | RUPIAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Dokumen | 84.00 | 2,496,692,697.26 | 14.00 | 354,874,677.00 | 3.00 | 4,830,000.00 | 3.00 | 1,610,000.00 | 5.00 | 155,439,072.00 | 3.00 | 178,617,500.00 | 14.00 | 340,496,572.00 | 14.00 | 340,496,572.00 | 16.67 | 3.20 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 6.00 | 2,858,955,764.94 | 1.00 | 372,766,438.00 | - | 2,350,000.00 | - | 1.00 | 211,511,223.00 | - | 103,500,000.00 | 1.00 | 317,361,223.00 | 1.00 | 317,361,223.00 | 16.67 | 11.10 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala | Dokumen | 30.00 | 2,950,233,421.75 | 5.00 | 419,846,343.00 | 2.00 | 236,243,400.00 | 1.00 | 45,081,000.00 | 1.00 | 57,848,250.00 | 1.00 | 46,144,246.00 | 5.00 | 385,316,896.00 | 5.00 | 385,316,896.00 | 16.67 | 13.06 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | dokumen | 6.00 | 507,739,141.20 | 1.00 | 54,769,500.00 | - | - | - | - | 1.00 | 9,263,000.00 | 1.00 | 9,263,000.00 | 1.00 | 9,263,000.00 | 1.00 | 9,263,000.00 | 16.67 | 1.82 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | orang | 972.00 | 1,105,393,604.51 | 162.00 | 162,512,169.00 | 40.00 | 33,000,000.00 | 40.00 | 11,000,000.00 | 40.00 | 73,055,560.00 | 42.00 | 24,100,000.00 | 162.00 | 141,155,560.00 | 162.00 | 141,155,560.00 | 16.67 | 12.77 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Laporan | 192.00 | 733,149,512.00 | 32.00 | 107,785,785.00 | - | - | - | - | 9,213,044.00 | 32.00 | 76,757,000.00 | 32.00 | 85,970,044.00 | 32.00 | 85,970,044.00 | 16.67 | 11.73 | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persen | 100.00 | 658,929,518,767.41 | 100.00 | 122,692,434,002.00 | 20.35 | 24,972,382,117.00 | 3.52 | 4,324,874,040.00 | 12.46 | 15,292,703,638.00 | 12.73 | 15,616,533,479.00 | 49.07 | 60,206,493,274.00 | 9.14 | 60,206,493,274.00 | 9.14 | 9.14 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan | 6.00 | 389,048,565.01 | 1.00 | 49,083,000.00 | - | - | - | - | 1.00 | 41,696,000.00 | 1.00 | 41,696,000.00 | 1.00 | 41,696,000.00 | 16.67 | 10.72 | | |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Laporan | 36.00 | 86,217,759,371.97 | 6.00 | 12,675,516,689.00 | 2.00 | 1,782,733,117.00 | 2.00 | 603,472,040.00 | 2.00 | 2,680,924,623.00 | - | 1,557,067,308.00 | 6.00 | 6,624,197,088.00 | 6.00 | 6,624,197,088.00 | 16.67 | 7.68 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 72.00 | 239,476,297,718.67 | 12.00 | 33,307,034,313.00 | 3.00 | 5,689,649,000.00 | 3.00 | 721,402,000.00 | 3.00 | 6,403,373,060.00 | 3.00 | 5,290,783,950.00 | 12.00 | 18,105,208,010.00 | 12.00 | 18,105,208,010.00 | 16.67 | 7.56 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan | 72.00 | 332,846,413,111.77 | 12.00 | 76,660,800,000.00 | 3.00 | 17,500,000,000.00 | 3.00 | 3,000,000,000.00 | 3.00 | 6,208,405,955.00 | 3.00 | 8,726,986,221.00 | 12.00 | 35,435,392,176.00 | 12.00 | 35,435,392,176.00 | 16.67 | 10.65 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persen | 100.00 | 14,240,026,467.00 | 100.00 | 2,156,956,188.00 | 30.92 | 666,865,776.00 | 4.16 | 89,770,000.00 | 28.23 | 608,988,135.00 | 24.73 | 533,350,177.00 | 88.04 | 1,898,974,088.00 | 13.34 | 1,898,974,088.00 | 13.34 | 13.34 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | dokumen | 24.00 | 1,273,028,112.96 | 4.00 | 161,724,370.00 | 1.00 | 7,560,000.00 | - | 2,520,000.00 | 1.00 | 73,385,039.00 | 2.00 | 60,080,000.00 | 4.00 | 143,545,039.00 | 4.00 | 143,545,039.00 | 16.67 | 11.28 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | dokumen | 72.00 | 2,033,936,673.27 | 12.00 | 286,000,000.00 | 3.00 | 48,750,000.00 | 3.00 | 17,250,000.00 | 3.00 | 89,250,000.00 | 3.00 | 102,050,000.00 | 12.00 | 257,300,000.00 | 12.00 | 257,300,000.00 | 16.67 | 12.65 |
| | | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 180.00 | 10,933,061,680.77 | 30.00 | 1,709,231,818.00 | 8.00 | 610,555,776.00 | 8.00 | 70,000,000.00 | 8.00 | 446,353,096.00 | 6.00 | 371,220,177.00 | 30.00 | 1,498,129,049.00 | 30.00 | 1,498,129,049.00 | 16.67 | 13.70 |
| 3 | Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan- | | | | | | Persentase Laporan BMD Kota Bandar Lampung Yang tepat waktu | Persen | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | 100.00 | | | 1.00 | | |
| | | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persen | 100.00 | 18,454,480,998.14 | 100.00 | 3,399,258,766.00 | 10.41 | 354,021,548.00 | 1.93 | 65,487,000.00 | 52.74 | 1,792,712,172.00 | 14.80 | 503,033,655.00 | 79.88 | 2,715,224,375.00 | 14.71 | 2,715,224,375.00 | 14.71 | 14.71 |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persen | 100.00 | 18,454,480,998.14 | 100.00 | 3,399,258,766.00 | 10.41 | 354,021,548.00 | 1.93 | 65,487,000.00 | 52.74 | 1,792,712,172.00 | 14.80 | 503,033,655.00 | 79.88 | 2,715,224,375.00 | 10.85 | 2,002,170,808.00 | 10.85 | 10.85 |

| No | SASARAN | KODE | | | | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGLATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT) | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2030 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2024) | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) S/D TW I | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025) | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%) | | UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------------|---------|----------|------------------|---|--|--|--------|---|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------|--------------|---|----------------|--|-------|--|----------------|--|----------------|----------------|-------|--------|---|--------|--------|
| | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | | | | SUB KEGIATAN | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | I | | II | | III | | IV | | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | RUPIAH | K | | | | | | | | RUPIAH |
| 1 | 2 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang disusun | Dokumen | 6.00 | 1,471,024,367.24 | 1.00 | 216,266,278.00 | - | - | 7,393,000.00 | 1.00 | 207,051,350.00 | - | - | 1.00 | 214,444,350.00 | 1.00 | 214,444,350.00 | 16.67 | 14.58 | | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah | Dokumen | 4.00 | 735,103,640.33 | 2.00 | 108,073,076.00 | - | 3,820,000.00 | - | - | 1.00 | 66,295,030.00 | - | - | 1.00 | 70,115,030.00 | 1.00 | 70,115,030.00 | 25.00 | 9.54 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah | Laporan | 6.00 | 1,241,372,758.94 | 1.00 | 182,503,480.00 | - | 26,935,000.00 | - | - | 1.00 | 58,748,774.00 | - | - | 1.00 | 85,683,774.00 | 1.00 | 85,683,774.00 | 16.67 | 6.90 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 6.00 | 5,291,019,731.42 | 1.00 | 960,659,566.00 | - | 109,116,048.00 | - | 36,904,000.00 | 1.00 | 285,953,506.00 | - | 170,949,000.00 | 1.00 | 602,922,554.00 | 1.00 | 602,922,554.00 | 16.67 | 11.40 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian barang milik daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang | Laporan | 6.00 | 820,178,578.44 | 1.00 | 120,580,578.00 | - | - | - | - | - | 27,483,240.00 | - | 68,421,007.00 | 1.00 | 95,904,247.00 | 1.00 | 95,904,247.00 | 16.67 | 11.69 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 120.00 | 2,892,780,555.04 | 20.00 | 405,739,273.00 | 5.00 | 57,310,500.00 | - | - | 10.00 | 255,800,179.00 | 5.00 | - | 20.00 | 313,110,679.00 | 20.00 | 313,110,679.00 | 16.67 | 10.82 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Dokumen | 12.00 | 4,606,584,079.47 | 2.00 | 677,248,328.00 | 1.00 | 132,622,000.00 | - | 21,160,000.00 | 1.00 | 315,415,308.00 | - | 150,792,866.00 | 2.00 | 619,990,174.00 | 2.00 | 619,990,174.00 | 16.67 | 13.46 | | | |
| | | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | Laporan | 4.00 | 1,396,417,287.27 | 2.00 | 728,188,187.00 | - | 24,218,000.00 | - | - | 1.00 | 634,713,559.00 | - | 54,122,008.00 | 1.00 | 713,053,567.00 | 3.00 | 713,053,567.00 | 75.00 | 51.06 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | 48.52 | | | 22.68 | 10.08 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | R | | | SR | SR | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | 1,714,296,683,546.00 | | - | | 270,342,393,696.00 | | 41,045,233,811.00 | | 8,859,071,543.00 | | 45,744,545,571.00 | | 35,417,377,804.00 | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalamrenja PD tahun berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bandar Lampung, Januari 2026
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung,

Zakky Irawan, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19801219 200501 1 007